



RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2023 disusun sebagai tahun ketiga dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024, secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2023 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2023 disamping dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) tahun 2023.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah dalam pengembangan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia dan barang.

Jakarta, November 2022

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN



HARNO TRIMADI

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720723 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN.....	1
1.1 DASAR HUKUM.....	1
1.2 LATAR BELAKANG.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN.....	3
RENCANA STRATEGIS 2020-2024	11
2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024	11
2.2 KONSEP REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024.....	16
CAPAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	19
3.1 CAPAIAN PEMBANGUNAN.....	19
3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2022.....	20
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023	21
4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2023.....	22
PENUTUP	24
LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Rencana kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Dengan berpedoman pada Revisi Konsep Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024 Bidang Prasarana Perkeretaapian, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2023 yang merumuskan indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2023.

Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2023 memuat tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta kegiatan pendukungnya. Adapun uraian Rencana Kinerja Tahunan tersebut akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2022 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2023 diharapkan dapat memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menetapkan rencana target pada indikator – indikator kinerja terhadap sasaran program atau kegiatan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai tolok ukur kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang akan dicapai tahun 2023.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 Bidang Prasarana Perkeretaapian.

Rencana Kinerja Tahunan menjadi salah satu komponen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di setiap unit kerja dalam Lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1.4 ORGANISASI DAN TUPOKSI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2010, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang didalamnya terdapat unit kerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara legalitas kedudukannya dibawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Rehabilitasi prasarana perkeretaapian;
- b. Peningkatan dan pembangunan prasarana perkeretaapian dan pendukung operasional kereta api;
- c. Pemeriksaan kualitas prasarana perkeretaapian;

- d. Standarisasi material, sistem, desain yang digunakan untuk pengadaan prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah 1 yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

2. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

3. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api.

4. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

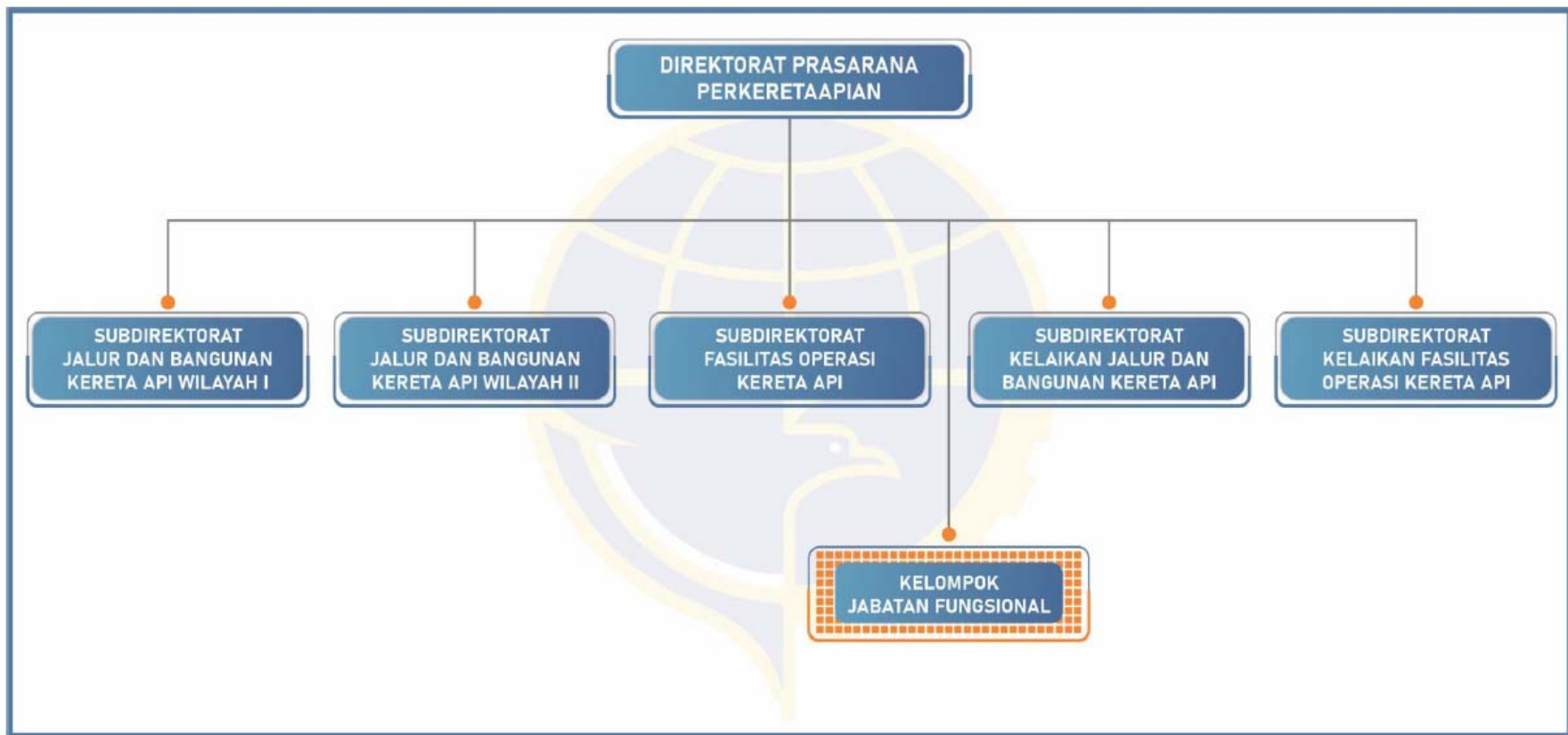
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

5. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; dan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

2.1 RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2024

Perkembangan Pembangunan bidang transportasi perkeretaapian akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, dan diharapkan dapat menjadi tulang punggung angkutan darat, maka kebijakan transportasi ke depan akan sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian nasional yang tentu akan terpengaruh oleh kelambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berisi program-program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sejalan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun internal Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dengan penetapan Surat Keputusan Nomor : PR. 005/SK. 89/DJKA/2020. Sebagai tindaklanjut ditetapkannya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana Prasarana telah Menyusun rencana strategis bidang prasarana perkeretaapian tahun 2020-2024.

Penyusunan indikator-indikator kinerja kegiatan Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian berdasarkan cascading sasaran program Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020-2024 dengan penetapan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : HK. 209/1/9/DJKA/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Indiaktor Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi Yang Terhubung Jalur Kereta Api
2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung PELAYANAN Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI
		Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan Dan Telekomunikasi Perkeretaapian
		Jumlah Peningkatan Gardu Traksi Dan LAA Perkeretaapian
3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
		Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
		Jumlah Rumusan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian
		Persentase Penetapan / Persetujuan / Perijinan Dibidang Prasarana Perkeretaapian Yang Tepat Waktu
4	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Penyerapan Anggaran
		Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Dari penetapan indikator kinerja kegiatan diatas maka disusunlah target rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 dengan target masing-masing indiaktor sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
					2020	2021	2022	2023	2024	
SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK P1	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang terhubung Jalur KA	Lokasi	37	38	38	39	41	41
SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK P2.1	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,84	84,97	87,10	89,94	94	94
		IKK P2.2	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	0	0	21	-	-	21
		IKK P2.3	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	Unit	0	0	4	-	-	4
SK P3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km'sp	195	60	170	150	200	759
		IKK P3.2	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	150	150	180	200	215	895
		IKK P3.3	Jumlah Rumusan NSPK bidang	Dokumen	18	12	12	10	11	63

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
					2020	2021	2022	2023	2024	
			Prasarana Perkeretaapian							
		IKK P3.4	Persentase Penetapan/Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	1.428.728.000	1.739.440.000	1.913.3884.000	2.104.722.400	2.315.194.640	9.501.469.040
		IKK P4.2	Persentase Penyerapan Anggaran	%	94	100	100	100	100	100

Tabel 2.3
Perkiraan Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024

No	Program/Kegiatan		2020 (Rp. Milyar)	2021 (Rp. Milyar)	2022 (Rp. Milyar)	2023 (Rp. Milyar)	2024 (Rp. Milyar)	Total (Rp. Milyar)
1	Program Infrastruktur Konektivitas		1.746,051	4.778,294	8.530,553	7.928,697	8.097,137	31.080,732
	a.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	627,265	2.872,694	4.261,745	5.975,712	6.097,913	19.835,329
	b.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	271,700	518,300	614,204	-	-	1.404,204
	c.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	844,781	1.384,631	3.650,818	1.949,216	1.995,078	9.824,524
	d.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	2,305	2,670	3,785	3,769	4,146	16,674
2	Program Dukungan Manajemen		28,618	38,342	44,541	49,159	47,416	208,076
	a.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	28,618	38,342	44,541	49,159	47,416	208,076
Total Pagu 2020 - 2024			1.774,670	4.816,637	8.575,094	7.977,855	8.144,552	31.288,808

Pada tahun anggaran 2020, dampak dari pandemi Covid-19 terdapat kebijakan penghematan anggaran dilingkungan Kementerian Perhubungan. Khususnya pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah dilakukan penghematan anggaran pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Pemotongan Anggaran Tahun 2020 Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Kode	SASARAN	PAGU ANGGARAN AWAL TAHUN 2020	PENGHEMATAN TAHUN 2020	PAGU 2020 SETELAH PENGEHEMATAN
1968	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	4.969.960.731.000	3.195.261.053.000	1.774.699.678.000

2.2 PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024 DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pada tahun 2021 Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome). Perubahan indikator kinerja kegiatan berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/62/M.AA.05/2021 perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 dan hasil pembahasan sesuai dengan Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/8/4/K1/DJKA/2021 Tanggal 24 Mei 2021 Perihal Undangan Rapat Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: UM.207/9/19/K1/DJKA/2021 tanggal 15 Juni 2021 Perihal Pembahasan Indikator Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : HK.209/2/6/DJKA/2021 Tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan rincian dan target sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK P1	Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	IKK P1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah
SK P2	Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung PELAYANAN Perkeretaapian	IKK P2.1	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai Dengan TQI Kategori I dan II
		IKK P2.2	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal
SK P3	Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Persentase Prasarana Perkeretaapian Yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)
		IKK P3.2	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian
SK P4	Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian
		IKK P4.2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Dari penetapan indikator kinerja kegiatan diatas maka disusunlah target rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024 dengan target masing-masing indiaktor sebagai berikut :

Tabel 2.6
Konsep Revisi Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2020 - 2024

SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					Total
					2020	2021	2022	2023	2024	
SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK 1.1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,409	0,416	0,436	0,443	0,456	0,456
SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK 2.1	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,83	84,97	87,10	89,94	94,00	94,00
		IKK 2.2	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	%	53,07	59,33	60,18	62,14	63,30	62,92
SK P3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK 3.1	Persentase Prasarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)	%	69,59	77,39	84,23	92,00	100,00	100,00
		IKK 3.2	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	54,17	66,67	73,61	83,33	100,00	100,00
SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	94,00	99,00	99,80	100,00	100,00	100,00
		IKK P4.2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CAPAIAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

3.1 CAPAIAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, pelayanan dan peningkatan kapasitas perkeretaapian selama tahun 2015 – 2019 telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 1.025,62 Km, peningkatan / rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/ keandalannya sepanjang 717,57 Km, pembangunan stasiun dan bangunan lain sebanyak 77 unit dan peningkatan/pembangunan fasilitas operasi sebanyak 58 unit dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Pembangunan Prasarana Perkeretaapian 2015 – 2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Pembangunan Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi	Km'sp	89,91	94,82	188,56	370,76	281,56	1.025,62
Peningkatan dan Perawatan/ Rehabilitasi Jalur KA	Km	333,6	39	8,28	228,99	107,7	717,57
Pembangunan Stasiun / Bangunan Operasional Kereta Api	Unit	6	1	5	38	25	77
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi	Unit	23	3	9	5	18	58

Pada periode tahun 2020 – 2021, telah dilakukan pembangunan perkeretaapian antara lain meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur ganda dan reaktivasi sepanjang 134,118 Km, peningkatan / rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi/ keandalannya sepanjang 707,41 Km, pembangunan stasiun dan bangunan lain sebanyak 17 unit dan Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi sebanyak 46 unit dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Pembangunan Prasarana Perkeretaapian 2020 – 2022

URAIAN	SATUAN	2020	2021	2022	TOTAL
Pembangunan Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi	Km'sp	104,218	43,14	176,12	323,478
Peningkatan dan Perawatan/ Rehabilitasi Jalur KA	Km	607,790	424,322	74,249	1.106,361
Pembangunan Stasiun / Bangunan Operasional Kereta Api	Unit	14	3	1	18
Peningkatan/Pembangunan Fasilitas Operasi	Unit	36	10	22	68

3.3 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 – 2022

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada periode tahun 2020 – 2022, capaian kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk tahun 2020 dan tahun 2022 dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020 – 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			CAPAIAN KINERJA		
			2020	2021	2022	2020	2021	*2022
Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,409	0,416	0,436	0,409	0,416	0,416
Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,83	84,97	90,34	82,83	84,97	91,37
	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	%	57,67	59,33	57,96	59,67	59,33	56,46

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			CAPAIAN KINERJA		
			2020	2021	2022	2020	2021	*2022
Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	Persentase Prasarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)	%	69,59	77,39	85,37	69,59	77,39	84,49
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	54,17	66,67	82,43	54,17	66,67	68,92
Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	94,00	99,00	95,57	99,74	99,00	57,99
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100	100	100	105,72	198,66	49,17

Keterangan : * Capaian Kinerja s.d TW 3 tahun 2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN TAHUN 2023

Kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Adapun tugas dari Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Secara lengkap, berikut rincian Rencana Target Kinerja dan Anggaran untuk Tahun 2023 :

Tabel 4.1
Target dan Pendanaan Sasaran Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian
* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA*
Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,450	459.800.023
JUMLAH			459.800.023

Tabel 4.2
Target dan Pendanaan Sasaran Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian
* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA*
Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	91,37	26.413.059
Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api dengan Teknologi Handal	%	64,43	212.735.110
JUMLAH			239.148.169

Tabel 4.3
Target dan Pendanaan Sasaran Meningkatkan KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian

* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA*
Persentase Prasarana Perkeretaapian yang Telah Memiliki Sertifikasi Kelaikan (Jalur, Bangunan, Fasilitas Operasi)	%	94,60	588.543.607
Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	89,19	4.452.905
JUMLAH			592.996.512

Tabel 4.4
Target Fisik dan Pendanaan Sasaran Terwujudnya GOOD GOVERNANCE Dan CLEAN GOVERNMENT Di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian

* dalam ribu rupiah

SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA & ANGGARAN	
		VOL	BIAYA*
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian	%	99,07	35.181.808
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	100	-
JUMLAH			35.181.808

Detail target kegiatan dan anggaran secara lengkap permasing-masing indikator kinerja kegiatan terdapat pada lampiran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2023.

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2023 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan di sub fungsi perhubungan dan dukungan dari para penyelenggara lainnya serta masyarakat secara umum. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis dan perubahan kebijakan yang terkait dengan *New Initiatives* maka Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tersebut dapat direview dan dilakukan penyesuaian.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan dibidang perhubungan harus secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Perkeretaapian tahun 2023 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan bidang perkeretaapian yang dapat dinikmati secara aman, nyaman dan terjangkau.

LAMPIRAN A
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,45
Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Transportasi Kereta Api	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai Dengan TQI Kategori I Dan II	%	91,37
	Persentase Fasilitas Operasi Kereta Api Dengan Teknologi Handal	%	64,43
Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	94,60
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian	%	89,19
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Dit. Prasarana	%	99,07
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN



HARNO TRIMADI, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720723 199803 1 004

LAMPIRAN B
RINCIAN KEGIATAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
TAHUN 2023

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN POK AWAL	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN							
IKK 1.1 RASIO KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH		0,450	Rasio			459.800.023.000	
1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah I: - PKN/PKW/Simpul Transportasi yang telah terhubung Jalur KA Wilayah I: Serang, Cilegon, Jabodetabek, Rangkasbitung, Cikampek-Cikopo, Cirebon, Bandung Raya, Sukabumi, Indramayu, Tasikmalaya, Kedungsepur, Cilacap, Surakarta, tegal, Pekalongan, Cepu, Purwokerto, Kebumen, Klaten, Yogyakarta, Sleman, Malang, Gerbangkertosusila, Bojonegoro, madiun, jember, banyuwangi, probolinggo, blitar, pasuruan, tulungagung, kediri, Barru, pel. Merak, Pel. Tanjung Priok, Pel. Cilacap, Bandara Soetta, Bandara Adi Sumarmo, Bandara Kulon Progo, Pelabuhan Garongkong, Maros, Pangkajene - PKW/Simpul Transportasi yang akan terhubung Jalur KA Tahun 2023: Pelabuhan Tanjung Mas	0,404	Rasio				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah I
2	Rasio Konektivitas Antar Wilayah II: - Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang telah terhubung Jalur KA Wilayah II: Mebidangro, rantauprapat, pematangsiantar, tebingtinggi, kisaran, Perkotaan Padang-Lubuk Agung-Pariaman, pariaman, patungraya Agung, Bandar Lampung, Lubuk Linggau, Muara enim, Baturaja, Prabumulih, Lahat, Kota Bumi, Pel. Belawan, Pel. Kuala Tanjung, Pel. Teluk Bayur, Pel. Tarahan, Bandara Kualanamu, Bandara Minangkabau, Bandara SM Badarudin - PKW/Simpul Transportasi yang akan terhubung Jalur KA Tahun 2023: PKW Sawahlunto	0,575	Rasio				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah II
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN							
1	DED Pembangunan Kereta Api menuju Pelabuhan Patimban	1	Dokumen			3.023.931.000	PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
2	DED Reaktivasi Jalur KA Kreceng - Anyer Kidul	1	Dokumen			2.102.465.000	PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
3	Reviu DED Pekerjaan Elevated Main Line dari MA 01 ke Jatinegara	1	Dokumen			1.500.000.000	PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
4	DED Jalur dan Jembatan Kereta Api Lintas Cipatat - Padalarang	1	Dokumen			3.837.776.000	PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
JUMLAH		3	Dokumen			10.464.172.000	
PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN DAN STUDI PENDUKUNG LAINNYA DI BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN							
1	Jasa Konsultan Pendampingan Persiapan Pengoperasian dan Monitoring Pengoperasian Awal Proyek Strategis Nasional LRT Jabodebek dan KCJB	14	Dokumen			33.378.410.000	PPK Urban Transport
2	Assistance In Tender AiT MRT East West Phase I Stage I	1	Dokumen			50.000.000	PPK MRT East West
3	Jasa Konsultan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek SYC 2023	1	Dokumen			38.979.515.000	PPK Urban Transport
4	Proyek Manajemen Unit PMU Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Proyek Direktorat Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1	Dokumen			16.652.881.000	PPK Urban Transport
JUMLAH		17	Dokumen			89.060.806.000	
PENGADAAN MATERIAL REL							
1	Pengadaan Rel untuk Penumpukan Wilayah Jakarta Banten dan Jawa Barat			3840	Batang	83.088.549.000	PPK Perawatan
2	Pengadaan Rel untuk Penumpukan Wilayah Jawa Barat						

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN POK AWAL	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
3	Pengadaan Rel untuk Penumpukan Wilayah Jawa Tengah			5.000	Batang	82.869.573.000	PPK Perawatan
4	Pengadaan Rel untuk Penumpukan Wilayah Jawa Timur			5.000	Batang	83.165.834.000	PPK Perawatan
JUMLAH				13.840	Batang	249.123.956.000	
PENGADAAN MATERIAL WESEL							
1	Pengadaan Wesel untuk Wilayah Jakarta Banten dan Jawa Barat			43	Unit	24.491.977.000	PPK Perawatan
2	Pengadaan Wesel untuk Wilayah Jawa Barat						
3	Pengadaan Wesel untuk Wilayah Jawa Tengah			34	Unit	16.694.319.000	PPK Perawatan
4	Pengadaan Wesel untuk Wilayah Jawa Timur			32	Unit	14.995.246.000	PPK Perawatan
JUMLAH				109	Unit	56.181.542.000	
SEWA LAHAN							
a	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Jawa Bagian Tengah	5.723	M2			546.113.000	PPK Perawatan
b	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Sumatera Selatan	10.000	M2			453.007.000	PPK Perawatan
c	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Kawasan Industri Medan Tahap III Block D	10.000	M2			764.503.000	PPK Perawatan
d	Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Jawa Bagian Timur	6.000	M2			402.176.000	PPK Perawatan
JUMLAH		31.723	M2			2.165.799.000	
JUMLAH PENGADAAN MATERIAL REL dan SEWA LAHAN						307.471.297.000	
PENYUSUNAN DESAIN/STD							
1	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I	12	Dokumen			36.996.000.000	PPK PHLN
2	Engineering Services Of Jakarta Mass Rapid Transit East West Line Project Phase I Stage II	-	Dokumen			100.000.000	PPK PHLN
JUMLAH		12	Dokumen			37.096.000.000	
PENYUSUNAN DESAIN/STD							
1	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I	1	Dokumen			13.476.383.000	PPK PHLN
JUMLAH		1	Dokumen			13.476.383.000	
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN							
1	Surabaya Regional Railway Line Phase I	1	Dokumen			100.000.000	PPK SRRL
JUMLAH		1	Dokumen			100.000.000	

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN POK AWAL	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
BIMBINGAN TEKNIS JALUR DAN BANGUNAN KERETA API							
1	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	2	Laporan			376.324.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
2	Bimbingan Teknis, serta Koordinasi Subdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	2	Laporan			378.903.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
JUMLAH		4	Laporan			755.227.000	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI JALUR DAN BANGUNAN KERETA API							
1	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	12	Laporan			935.047.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil I
2	Monitoring dan Evaluasi Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	12	Laporan			441.091.000	Kasubdit Jalur dan Bangunan KA Wil II
JUMLAH		24	Laporan			1.376.138.000	
PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN							
IKK 2.1 PERSENTASE PENGOPERASIAN JALUR KA YANG SESUAI DENGAN TQI KATEGORI I DAN II		91,37	%	26.413.059.000			
1	Persentase Kondisi Jalur Kereta Api yang sesuai Track Quality Index (TQI) dengan Kecepatan Minimum 80 Km/Jam	91,37	%				Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Monitoring Dan Evaluasi Pemeriksaan Jalan Rel Dengan Ka Ukur Di Wilayah Jawa, Sumatera Dan Sulawesi	1	Laporan			504.059.000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
JUMLAH		91,37	%			504.059.000	
PENINGKATAN JALUR KA							
1	Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya - Arjawinangun	14.000	m'sp			25.284.640.000	PPK Perawatan
2	Supervisi Peningkatan Jalur KA Lintas Cikampek - Cirebon segmen Kertasemaya - Arjawinangun	1	Dokumen			624.360.000	PPK Perawatan
JUMLAH			m'sp			25.909.000.000	
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN							
1	Basic Engineering Design (BED) Pengembangan Stasiun Tanah Abang						
2	Basic Engineering Design (BED) Pengembangan JPO untuk Akses menuju Stasiun Tanah Abang						
3	DED Peningkatan Stasiun KA, Jembatan, Jalur KA antara Belawan - Ujung Baru lintas Medan-Belawan-Ujung Baru						
4	Reviu Desain Jembatan KA antara Kutablang - Matang Glumpang lintas Kutablang - Bireun						
JUMLAH			-			-	

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN POK AWAL	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
IKK 2.2 PERSENTASE FASILITAS OPERASI KERETA API DENGAN TEKNOLOGI HANDAL		63,88	%	212.735.110.000			
1	Jumlah Persinyalan Elektrik Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Jawa, Sumatera, Sulawesi	366	Unit				Kasubdit Fasilitas Operasi KA
2	Jumlah Persinyalan Mekanik Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Jawa, Sumatera, Sulawesi	210	Unit				
JUMLAH		576	Unit				
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN PERSINYALAN							
1	Pembangunan dan Peningkatan Persinyalan (Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi LRT Jabodebek 1 Unit, Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi KCIC 4 Unit, Pembangunan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Stasiun Mandai 1 Unit)	6	Unit				Kasubdit Fasilitas Operasi KA, PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
2	Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara-Bogor-dan Manggarai-Jakarta Kota (MYC 2020-2023) (Penambahan Interlocking Bogorline 3 unit: Pasar Minggu, Universitas Indonesia, Depok Baru)	3	Unit			195.645.196.000	
3	Supervisi Peningkatan Fasilitas Operasi Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakartakota (MYC 2020-2023)			1	Laporan	2.477.206.000	
JUMLAH		9	Unit	1	Laporan	198.122.402.000	
1	Peningkatan Gardu Traksi dan Listrik Aliran Atas Perkeretaapian pada Lintas Jatinegara - Bogor dan Manggarai - Jakartakota (MYC 2020-2023) (Tanjung Barat)	1	Unit			11.877.598.000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA, PPK Peningkatan FASOP KA Jabodebek
JUMLAH		1	Unit			11.877.598.000	
BIMBINGAN TEKNIS FASILITAS OPERASI KERETA API							
1	Bimbingan Teknis Fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	2	Laporan			441.590.000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		2	Laporan			441.590.000	
PEMANTAUAN DAN EVALUASI FASILITAS OPERASI KERETA API							
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, Telekomunikasi dan Instalasi Listrik)	12	Laporan			393.520.000	Kasubdit Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		12	Laporan			393.520.000	
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN							
1	DED Pembangunan Depo Pulo Brayan termasuk Persinyalan dan Telekomunikasi	1	Dokumen			1.900.000.000	PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
2	DED Pembangunan Depo Kereta Api Untuk Mendukung Elektrifikasi Jalur KA antara Padaalarang-Cicalengka						PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
3	DED Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Jalur Lintas Kertosono - Ketapang						PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
JUMLAH		2	Dokumen			1.900.000.000	

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN POK AWAL	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN							
IKK 3.1 PERSENTASE PRASARANA PERKERETAAPIAN YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKASI KELAIKAN (JALUR, BANGUNAN, FASILITAS OPERASI)		92,97	%	588.543.607.000			
a.	Baseline Jumlah Sertifikat Prasarana Perkeretaapian			1.831			
1	Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api			1.136	Sertifikat		Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api			695	Sertifikat		Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
b.	Capaian Sertifikasi Keaikaan Tahun 2021			184			
1	Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api		%	65	Sertifikat		Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api		%	119	Sertifikat		Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
c.	Capaian Sertifikasi Kelaikan Tahun 2022			274			
1	Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api	90,28	%	118	Sertifikat		Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	82,91	%	156	Sertifikat		Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
d.	Jumlah Sertifikat yang ditargetkan akan selesai tahun 2023			200			
1	Sertifikasi Jalur dan Bangunan Kereta Api	95,41	%	75	Sertifikat	481.627.000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
2	Sertifikasi Fasilitas Operasi Kereta Api	93,59	%	125	Sertifikat	442.609.000	Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		94,60	%	2.489	Sertifikat	924.236.000	
BIMBINGAN TEKNIS KELAIKAN JALUR DAN BANGUNAN KERETA API							
1	Bimbingan Teknis Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	1	Laporan			386.224.000	Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
JUMLAH		1	Laporan			386.224.000	
BIMBINGAN TEKNIS KELAIKAN FASILITAS OPERASI KERETA API							
1	Bimbingan dan Koordinasi Teknis Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	2				500.024.000	Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		2	Laporan			500.024.000	
PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/REHABILITASI JALUR, JEMBATAN, STASIUN DAN FASILITAS OPERASI KERETA API							
- PERAWATAN KAI							
1	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara IMO	5.634	Km'sp			500.000.000.000	PPK IMO KAI
2	Jasa Konsultansi Manajemen Pelaksanaan IMO	1	Dokumen			3.130.910.000	PPK IMO KAI
3	Jasa Konsultansi Pengawasan Pelaksanaan IMO di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara	1	Dokumen			2.462.966.000	PPK IMO KAI
4	Jasa Konsultansi Pengawasan Pelaksanaan IMO di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat	1	Dokumen			2.123.474.000	PPK IMO KAI
5	Jasa Konsultansi Pengawasan Pelaksanaan IMO di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan	1	Dokumen			2.701.380.000	PPK IMO KAI
6	Jasa Konsultansi Pengawasan Pelaksanaan IMO di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa	1	Dokumen			11.229.752.000	PPK IMO KAI
JUMLAH		5	Dokumen			521.648.482.000	

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN POK AWAL	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
- PERAWATAN NON KAI							
7	Perkuatan lereng abutment 1 dan 2 HuluHilir serta perkuatan lereng area sungai Glagah BH 1120	1	Unit			16.319.342.000	PPK Perawatan
8	Supervisi Perkuatan lereng abutment 1 dan 2 HuluHilir serta perkuatan lereng area sungai Glagah BH 1120	1	Dokumen			749.187.000	PPK Perawatan
9	Penanganan longsoran pada KM 63 1 2 antara Doplang-Randublatung jalur hulu lintas SemarangSurabaya Pasar Turi	1	Unit			13.000.000.000	PPK Perawatan
10	Supervisi Penanganan longsoran pada KM 63 1 2 antara Doplang-Randublatung jalur hulu lintas SemarangSurabaya Pasar Turi	1	Dokumen			400.000.000	PPK Perawatan
11	Penanganan Perlintasan Sebidang pada Jalur KA di Wilayah Jawa dan Sumatera	43	Unit			29.942.277.000	PPK Perawatan
12	Supervisi Penanganan Perlintasan Sebidang pada Jalur KA di Wilayah Jawa dan Sumatera	1	Dokumen			3.273.835.000	PPK Perawatan
JUMLAH						63.684.641.000	
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN							
1	DED Peningkatan Jembatan antara Lubuk Alung - Kayutanam	1	Dokumen			1.400.000.000	PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
2	DED Penanganan Daerah Rawan Longsor dan Peningkatan Jembatan Kereta Api (BH 126, BH 134) antara Lubuk Alung - Kayutanam						
3	Kajian Penanganan BH 75 Segmen Ciomas - Maseng lintas Bogor - Sukabumi						
4	Kajian Penanganan Longsoran dan Kemanfaatan antara Stasiun RantauPrapat Baru - Pondok						
5	Kajian Sistem Hidrologi Hidrolika Lintas Mandai - Panlanro						
JUMLAH		1	Dokumen			1.400.000.000	
IKK3.2 PERSENTASE PEMENUHAN NSPK BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN		89,19	%	4.452.905.000			
1	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2023	7	Dokumen			652.905.000	
	Baseline Jumlah NSPK yang telah di tetapkan s.d Tahun 2022			59	Dokumen		
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit 1	2	Dokumen				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah I
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit 2	1	Dokumen				Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah II
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit 3	1	Dokumen				Kasubdit Fasilitas Operasi KA
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit 4	1	Dokumen				Kasubdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA
	Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian Subdit 5	2	Dokumen				Kasubdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA
JUMLAH		7	Dokumen		Dokumen	652.905.000	
PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN DAN STUDI PENDUKUNG LAINNYA DI BIDANG PRASARANA PERKERETAAPIAN							
5	Kajian Pedoman dan Standar Pemeriksaan Jembatan dan Jalan Rel Kereta Api	1	Dokumen			1.100.000.000	PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
6	Kajian Reviu Standar Teknis Sistem Persinyalan Perkeretaapian	1	Dokumen			900.000.000	PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN POK AWAL	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
7	Kajian Reviu Standar Teknis Sistem Telekomunikasi Perkeretaapian	1	Dokumen			900.000.000	PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
8	Kajian Reviu Standar Teknis Sistem Instalasi Listrik Perkeretaapian	1	Dokumen			900.000.000	PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian
JUMLAH		4	Dokumen			3.800.000.000	
GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN							
IKK P4.3 PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DIT. PRASARANA		92,95	%			34.771.425.000	
1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Satker PPPKA	1,29	%				Kuasa Pengguna Anggaran, PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Rutin, PPK PHLN, PPK FASOPKA Jabodebek, PPK Urban Transport, PPK IMO KAI, PPK Kasubbag TU
	Target Penyerapan Anggaran	2,58	%				
	Target Fisik	-	%				
2	Rapat Evaluasi Hasil Kinerja Satker Prasarana bersama Direktorat	1	Laporan			175.000.000	Sekretariat KPA
1	Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Penyusunan, Pelaporan	10	Dokumen			410.383.000	Kasubbag TU
4	Layanan Perkantoran : (Kantor PPK PPK Perawatan, PPK Perencanaan Teknis, PPK Rutin, PPK PHLN & MRT, PPK FASOPKA Jabodebek, PPK Urban Transport, PPK IMO KAI dan Subbag Tata usaha)	1	Laporan			11.533.239.000	PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Rutin, PPK PHLN, PPK FASOPKA Jabodebek, PPK Urban Transport, PPK IMO KAI, dan Kasubbag TU
a	Layanan Perkantoran (Subbag TU)					698.050.000	Kasubbag TU
b	Layanan Perkantoran (Kantor Keg. Rutin)					10.594.421.000	PPK Rutin
c	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh					240.768.000	PPK Rutin
5	Layanan Internal : Fasilitas Perkantoran (Kantor PPK PPK Perawatan, PPK Perencanaan Teknis, PPK Rutin, PPK PHLN & MRT, PPK FASOPKA Jabodebek, PPK Urban Transport, PPK IMO KAI dan Subbag Tata usaha)	1	Laporan			180.000.000	PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Rutin, PPK PHLN, PPK FASOPKA Jabodebek, PPK Urban Transport, PPK IMO KAI, dan Kasubbag TU
	Fasilitas Perkantoran						
	Kantor PPK Perencanaan Teknis dan Pengawasan Prasarana Perkeretaapian					20.000.000	PPK Urban Transport
	Kantor PPK Peningkatan Fasilitas Operasi KA Jabodetabek					20.000.000	PPK IMO KAI
	Kantor PPK Urban Transport					20.000.000	PPK Fasilitas
	Kantor Subbag Tata Usaha Direktorat Prasarana Perkeretaapian					100.000.000	PPK Perawatan
	Kantor PPK Kegiatan Rutin Direktorat Prasarana Perkeretaapian					20.000.000	PPK PHLN
6	Layanan Dukungan Manajemen Satker : a. Administrasi Kegiatan Pelelangan b. Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor PPK PPK Perawatan, PPK Perencanaan Teknis, PPK Rutin, PPK PHLN & MRT, PPK FASOPKA Jabodebek, PPK Urban Transport, PPK IMO KAI dan Subbag Tata usaha) c. Sistem Akuntansi Instansi	2	Laporan/ Dokumen			21.862.354.000	PPK Perawatan, PPK Fasilitas, PPK Rutin, PPK PHLN, PPK FASOPKA Jabodebek, PPK Urban Transport, PPK IMO KAI, dan Kasubbag TU
a	Administrasi Kegiatan Pelelangan					97.530.000	
b	Administrasi Kegiatan Lainnya					20.847.432.000	
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor IMO)					2.016.761.000	PPK IMO
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Perawatan)					1.412.198.000	PPK Perawatan
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Perencanaan Teknis)					1.374.211.000	PPK Perencanaan Teknis

NO	KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN POK AWAL	KETERANGAN
		Volume	Satuan	Volume	Satuan		
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Urban Transport)					1.473.136.000	PPK Urban Transport
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor MRT & PHLN)					1.186.944.000	PPK PHLN & MRT
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Peningkatan Jalur Lintas KA Jabodetabek)						
	Administrasi Kegiatan Lainnya - Kantor Pengembangan Perkeretaapian Perkotaan Surabaya						
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Peningkatan Fasop KA)					1.050.344.000	PPK Peningkatan FASOPKA Jabodetabek
	Administrasi Kegiatan Lainnya (Kantor Rutin)					12.333.838.000	PPK Rutin
c	Sistem Akuntansi Instansi					917.392.000	PPK Rutin
7	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1	Laporan			1.020.832.000	Kasubbag TU
8	Kegiatan Angkutan Lebaran dan Nataru						
JUMLAH		15	Dokumen/Laporan			35.181.808.000	
IKK P4.2 PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BIDANG PERKERETAAPIAN		100	%				
1	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.908.250.000	Rupiah				Bendahara Penerimaan
JUMLAH		1.908.250.000	Rupiah				
Anggaran Tahun 2022 Kegiatan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api						1.327.126.512.000	